

# Ujian Khittah (Politik)

## Muhammadiyah di Pilkada Serentak

**HAEDAR** Nashir dalam buku *Memahami Ideologi Muhammadiyah* (2014) menjelaskan bahwa Khittah Muhammadiyah tergambar dalam kepribadian Muhammadiyah: tidak buta politik, tidak takut politik, tetapi bukan organisasi politik. "Khittah Muhammadiyah tahun 1971" hasil Mukhtamar ke-38 di Ujungpandang, menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dan afiliasi dengan partai politik atau organisasi apapun.

Pada Mukhtamar Muhammadiyah tahun 1978 di Surabaya, dirumuskan khittah tentang partai politik, Muhammadiyah menyatakan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan partai politik atau organisasi apapun. Kemudian hasil Tanwir tahun 2002 di Denpasar menghasilkan "Khittah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara", yang diantaranya menyatakan: Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan politik atau organisasi manapun.

### Ujian Khittah Muhammadiyah Di Pilkada

Sungguhpun Khittah Muhammadiyah menegaskan tidak berpihak secara kelembagaan dalam politik praktis, namun ditemukan perilaku "deviasi" elit Persyarikatan Muhammadiyah beserta ortomnya dalam pilkada. Pada Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, generasi muda Muhammadiyah di bawah koordinasi Agus Pamuji Fitrianto (Sekretaris bidang IMM DKI Jakarta), menyatakan dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Wa-

laupun dukungan politik ini tidak atas nama organisasi, namun ia mengklaim diikuti ratusan pengurus IMM DKI Jakarta ([metrotvnews.com](http://metrotvnews.com), 08/11/2016). Pada putaran kedua, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta menyatakan mendukung penuh Anies-Sandi, dan membentuk

Relawan Muhammadiyah Jakarta (RMJ), di bawah komando Syahrul Hasan (Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PW Muhammadiyah DKI Jakarta/Ketua Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta) untuk menggalang dukungan dari kalangan Muhammadiyah ([news.okezone.com](http://news.okezone.com), 05/03/2017). Klaim dukungan politik atas nama Muhammadiyah ini dibantah oleh Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah), dan menegaskan bahwa dukungan politik tersebut bersifat personal, karena secara kelembagaan Muhammadiyah tidak pernah mendukung kandidat tertentu ([tribunnews.com](http://tribunnews.com), 04/03/2017).

Di beberapa daerah juga terlihat kecenderungan perilaku elit Muhammadiyah yang berusaha menyeret Muhammadiyah ke politik praktis. Di Sumatera Utara, Elynita Koto sebagai Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sumatera Utara, menyatakan mendukung Ade Sandrawati Purba sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara ([news.analisadaily.com](http://news.analisadaily.com)/14/08/2017). Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018, Amirullah bersama pengurus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bali menyatakan mendukung Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati ([telusur.co.id](http://telusur.co.id), 22/11/2017). Pada Pilkada Gubernur

dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Kasful Anwar (elit Muhammadiyah) membentuk relawan "Japri Hasanah" (Jaringan Pemilih Pintar Hasanah) (Jaringan Pemilih Pintar Hasanah) yang berasal dari ekponen Muhammadiyah, untuk mendukung Tb. Hasanuddin-Anton Charlyan (tribunnews.com 28/01/

2018). Maigus Nasir, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padang, menyatakan seluruh keluarga besar Muhammadiyah mendukung penuh Mahyeldi-Hendri Septa sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pilkada tahun 2018 (news.klikpositif.com).

Terlihat, dua pola perilaku elit Muhammadiyah dalam mendukung kandidat pada pilkada: Pertama, mendukung atas nama "peribadi", namun tetap saja menyebut-nyebut dan menggunakan jaringan Muhammadiyah. Kedua, memberikan dukungan politik secara resmi atas nama "lembaga" Muhammadiyah, yang tentu saja bertentangan dengan Khittah Muhammadiyah.

#### **Merawat Khittah Muhammadiyah di Pilkada**

Sebagai salah satu organisasi "Islam berkemajuan" terbesar di Indonesia, posisi Muhammadiyah sangatlah strategis. Dengan jaringan organisasi dan jumlah anggota serta simpatisan yang tersebar di berbagai wilayah, Muhammadiyah merupakan lumbung suara potensial di Pilkada. Muhammadiyah dapat dianalogikan seperti seorang gadis cantik, yang menarik hasrat setiap lelaki untuk mempersuntingnya. Oleh sebab itu, kandidat dalam pilkada selalu menjadikan Muhammadiyah beserta jaringan ortomnya sebagai target politik untuk meraup suara. Dalam pilkada serentak ini, "konsistensi" segenap elit dan pengurus Muhammadiyah dan ortomnya diuji, apakah sanggup mematuhi Khittah Muhammadiyah, atau malah sebaliknya tergoda dan menabrak rambu rambu yang ada.

Segecap elit dan pengurus Muhammadiyah beserta ortom dan amal usaha di segala tingkatan, juga sangat perlu mematuhi seruan dari Haedar Nashir (Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah) yang menegaskan bahwa posisi Muhammadiyah netral dalam pilkada serentak, Muhammadiyah tetap sebagai organisasi dakwah dan tidak termasuk kancuh pilkada sebagaimana partai politik (<https://news.detik.com>). Para penggerak organisasi Muhammadiyah sebaiknya juga tidak membawa institusi dalam percaturan politik. Pengurus persyarikatan hendaklah tetap memposisikan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah kemasyarakatan yang tidak berpolitik praktis. Untuk itu warga Muhammadiyah harus menghindari membuat pernyataan-pernyataan resmi yang mengatasmakan Muhammadiyah secara kelembagaan, ketika memberikan dukungan politik terhadap kandidat (nasional.harianterbit.com, 15/1/2016).

Bagi pengurus Muhammadiyah dan jajaran ortom dan amal usaha yang telah memutuskan pilihan politik menjadi tim sukses/tim kampanye kandidat tertentu, harus non-aktif sementara dari jabatannya di Muhammadiyah sampai selesai pilkada, sebagaimana diatur oleh SK PP Muhammadiyah Nomor 41/KEP/LO IBI. Para pengurus Muhammadiyah non aktif sementara dilarang melibatkan organisasi dan amal usaha di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah untuk kepentingan politik pilkada. Juga dilarang menggunakan lambang/symbol, fasilitas, dana, dan infrastruktur yang dimiliki persyarikatan dan amal usaha dalam kegiatan pilkada tersebut.

Konsistensi pengurus Muhammadiyah dan jajaran ortom serta amal usahanya dalam mentaati khittah Muhammadiyah adalah mutlak, untuk mencegah persyarikatan Muhammadiyah tergelincir ke dalam percaturan politik praktis dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik kandidat tertentu dalam pilkada. (\*)

**SADRI CHANIAGO**

*Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas*